



RENCANA KERJA PERUBAHAN RUMAH SAKIT JiWA MUTIARA SUKMA TAHUN 2022



Alamat :
Jl. Ahmad Yani No.1 Selagalas Mataram
Kode Pos 83237
Telp. (0370) 672140, Fax. 671515
Email : rsjmutiarasukma@gmail.com
Website: rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSJ Mutiara Sukma Tahun 2022 dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Renja Perubahan ini merupakan penjabaran pelaksanaan dari Renstra RSJ Mutiara Sukma Tahun 2019-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSJ Mutiara Sukma.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini adalah dokumen Perencanaan untuk periode Triwulan IV tahun berkenaan, yang memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) RSJ Mutiara Sukma Tahun 2022 Triwulan III dan urusan mengenai tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta didalamnya memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Kritik dan saran untuk kesempurnaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini sangat kami harapkan, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terkait dan ikut mendukung dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2022 ini.

Mataram, Oktober 2022

**DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA
MUTIARA SUKMA**



Dr. EVI KUSTINI SOMAWIJAYA, MM

Pembina Tk I

NIP. 19640805 199603 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSJ Mutiara Sukma Tahun 2020 dan Capaian Renstra RSJ Mutiara Sukma	9
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan RSJ Mutiara Sukma	20
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSJ Mutiara Sukma.....	35
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSJ MUTIARA SUKMA.....	46
3.1 Sumber Daya RSJ Mutiara Sukma.....	47
BAB VI : PENUTUP.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perubahan adalah dokumen perencanaan untuk periode tahun berkenaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat oleh setiap Perangkat Daerah dan memuat evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan. Dalam prosesnya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan mengacu pada peraturan Gubernur No 80 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 dan dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan akumulasi dari seluruh rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Perubahan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah, yang dipakai sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022. Atas dasar hal tersebut maka penyusunan Rancangan Renja Perubahan Tahun 2022 merupakan tahapan mekanisme perencanaan yang sangat penting untuk dilakukan.

Renja Perubahan RSJ Mutiara Sukma merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Perubahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan melaksanakan fungsinya. Renja Perubahan RSJ Mutiara Sukma dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan merupakan perwujudan komitmen pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya pembangunan yang akan dilaksanakan secara bersama untuk satu tahun mendatang.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan, RSJ Mutiara Sukma mengalami perubahan struktur organisasi dengan ditetapkannya pergub No 53 tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 23 Desember 2019 dan diterapkan pada bulan februari 2020. Penyusunan Renja Perubahan RSJ Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan UPT yang bersifat kekhususan pada

keuangan, SDM dan Aset berdasarkan Pergub no 53 tahun 2019 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah satu-satunya yang khusus menangani pelayanan rujukan dan pengembangan pelayanan kesehatan jiwa mempunyai kewajiban mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Daerah dalam rangka ikut memberikan kontribusi terhadap pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui penyusunan Renja Perubahan Tahun 2022 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2019-2023 yang telah disusun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Renja Perubahan Tahun 2022 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai arah dan acuan bagi seluruh komponen RSJ Mutiara Sukma dalam menjalankan kebijakan pembangunan kesehatan khususnya kesehatan jiwa pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, fokus pelayanan RSJ Mutiara Sukma adalah pada upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan langsung di dalam gedung (*intramural*) dan pelayanan di luar gedung (*ekstramural*). Penyediaan sarana prasarana, SDM yang kompeten dan regulasi pendukung menjadi keharusan untuk dipenuhi, sehingga dapat mewujudkan Pembangunan Kesehatan berdasarkan pada prikemusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta bisa bermanfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan dan keluarga miskin.

Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma merupakan satu-satunya Rumah Sakit yang menyelenggarakan rawat inap pasien gangguan jiwa di Provinsi NTB dalam tahap perawatan rawat inap tersebut, dibutuhkan layanan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang juga menderita penyakit infeksi penyerta seperti penyakit-penyakit infeksi menular pada pernapasan atau infeksi menular pada kulit. Perawatan pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan penyakit infeksi menular perlu dipisahkan dari pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang lain agar infeksi yang dideritanya tidak menular ke pasien ODGJ yang lain. Pemisahan pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan penyakit infeksi menular dapat dipisahkan menurut jenis transmisinya, airborne, droplet atau kontak termasuk penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan Covid-19.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja RSJ Mutiara Sukma tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal H ayat 1 yang menegaskan tentang Hak untuk Hidup Sejahtera Lahir Batin, Bertempat Tinggal dan Mendapatkan Lingkungan yang Baik, Sehat dan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1469);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang pengesahan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 dan/atau. Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
9. Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perudahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Infeksi di fasilitas kesehatan;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perangkat Daerah.
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1);
 27. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 28. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023;
 29. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020;

30. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat;
31. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
32. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No.56 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Rumah Sakit Jiwa Provinsi;
33. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No 440-344 Tahun 2014 Tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB menjadi Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
34. Surat Keputusan Gubernur nomor 445-541/2020 tentang Penunjukkan RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB sebagai RS Rujukan COVID khusus Jiwa;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 mengacu pada peraturan gubernur NTB No 80 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 untuk merumuskan rencana kerja RSJ Mutiara Sukma untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Review Rencana Strategis (Renstra) RSJ Mutiara Sukma Tahun 2019-2023 dan perubahan-perubahan yang terjadi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini adalah sebagai pedoman dalam:

- a. Terlaksananya program prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan, guna mengoptimalkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan RSJ Mutiara Sukma sebagai penjabaran Rencana Strategis RSJ Mutiara Sukma Tahun 2019-2023;
- b. Ditetapkannya program dan kegiatan RSJ Mutiara Sukma Tahun 2022 dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;

- c. Menjadi tolak ukur pelaksanaan dan evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan untuk seluruh program dan kegiatan RSJ Mutiara Sukma pada Tahun 2020;
- d. Tersusunnya rencana anggaran perubahan RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2022;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja RSJ Mutiara Sukma tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rencana Kerja 2022.

BAB II Evaluasi Renja RSJ Mutiara Sukma Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSJ Mutiara Sukma sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra RSJ Mutiara Sukma.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSJ Mutiara Sukma
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSJ Mutiara Sukma
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan RSJ Mutiara Sukma

Memuat tentang rincian kebutuhan anggaran RSJ Mutiara Sukma dalam menjalankan program kegiatannya dan pendanaan program kegiatan RSJ Mutiara Sukma yang bersumber dari APBD (subsidi), BLUD maupun APBN (DAK, Dekon, dan TP), sumber daya yang dimiliki serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif (prakiraan tahun 2022).

BAB IV Penutup

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun jika ada ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan semester I tahun 2022 dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja, efektifitas program, masalah dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program melalui pencapaian indikator yang telah ditetapkan, baik dalam ukuran kuantitatif maupun kualitatif. Hasil evaluasi diharapkan dapat dipergunakan untuk program peningkatan kinerja atau produktivitas, pengembangan organisasi dan menghindari hambatan yang mungkin akan terjadi. Evaluasi atau pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kinerja, standar baku atau pencapaian tahun sebelumnya. Pengukuran Kinerja RSJ Mutiara Sukma didasarkan pada realisasi pencapaian indikator dan target program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja sampai dengan semester I tahun 2022.

Fokus utama kinerja sampai dengan semester I tahun 2022 tetap pada peningkatan mutu pelayanan yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja pelayanan dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama pencapaian nilai kepuasan pelanggan. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang mulai diterapkan di RSJ Mutiara Sukma tahun 2012 memberi peluang bagi RSJ Mutiara Sukma untuk mengembangkan program kegiatan dan mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan karena PPK-BLUD memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan bagi RSJ Mutiara Sukma, sehingga program kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien.

2. PRIORITAS KERJA RSJ MUTIARA SUKMA SEMESTER I TAHUN 2022

Prioritas kerja RSJ Mutiara Sukma antara lain:

- a) Akreditasi STARKES
- b) Peningkatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian target yang telah ditetapkan.
- c) Evaluasi dan revisi Standar Operasional Prosedur (SOP).
- d) Peningkatan disiplin pegawai, kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM).
- e) Revisi terhadap beberapa PERGUB Tata Kelola, SPM, dan pola tarif.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSJ Mutiara Sukma Semester I Tahun 2022 Dan Capaian Renstra RSJ Mutiara Sukma

Rencana program kerja RSJ Mutiara Sukma pada semester I Tahun 2022 disusun berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan mutu pelayanan, mendekatkan akses masyarakat ke pelayanan jiwa dan pengembangan pelayanan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi

- **Administrasi keuangan perangkat daerah**
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- **Administrasi kepegawaian perangkat daerah**
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- **Peningkatan pelayanan BLUD**
 - Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD

2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

- **Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, alat kesehatan untuk UKP rujukan, Ukm dan Ukm rujukan tingkat daerah provinsi**
 - Penyediaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan
 - Pengadaan obat, vaksin makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya
- **Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi**
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan kecanduan NAPZA
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan khusus
 - Operasi pelayanan rumah sakit

- **Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi**
 - Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan
- 3. **Program peningkatan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP provinsi**
 - **Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP provinsi**
 - Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan

Tabel T-C.1.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA RSJ MUTIARA SUKMA
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2022
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d TW II Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah s/d TW II tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai Sakip (OPD)	81	76,39	81	76,39	76,39	100	81	100
-	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pembayaran gaji ASN	100	92,8	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN	280	232	253	253	100	280	280	100
-	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terpenuhinya SPM	60	88,1	60	44	73	80	80	100
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah orang	291	12	26	19	73	291	291	100

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2019-2023	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d TW II Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah s/d TW II tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8 = (7/6)*100$	9	$10 = (5+7+9)$	$11 = (10/4)$
-	Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase kegiatan yang dilaporkan	100	-	100	-	-	100	100	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah laporan	12	-	-	-	-	12	12	100
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit	-	-	11	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan	-	-	2	-	-	-	-	-
-	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	-	-	-	-	100	100	100
	Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah unit	3	-	-	-	-	1	1	1

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2019-2023	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d TW II Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah s/d TW II tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
-	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah jenis sumber daya	3	3	3	3	100	3	3	100
-	Peningkatan pelayanan BLUD	Persentase realisasi pendapatan BLUD	100	78,12	77,81	33	42	100	100	100
	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah realisasi pendapatan BLUD	70.097.842.944	26.987.371.826,19	20.500.000.000	8.691.142.444,04	42	27.170.860.612	27.170.860.612	100
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Persentase SPM yang mencapai target	76,19	81,82	75	77,27	103	76,19	76,19	100

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2019-2023	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d TW II Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah s/d TW II tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian elemen akreditasi sesuai standar	80	80	80	80	100	80	80	100
-	Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan	93	89	91	24,14	27	93	93	100
	Pengembangan rumah sakit	Jumlah unit gedung	2	1	-	-	-	1	1	100
	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit	Jumlah unit	3	-	-	-	-	1	1	100
	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan	Jumlah unit alkes	187	19	36	-	-	96	96	100

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2019-2023	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d TW II Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah s/d TW II tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pengadaan prasarana fasilitas layanan kesehatan	Jumlah unit	174	46	-	-	-	85	85	100
	Pengadaan barang penunjang operasional rumah sakit	Jumlah unit	143	58	-	-	-	60	60	100
	Pengadaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah jenis	13	13	13	13	100	13	13	100
-	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	Persentase masyarakat yang terlayani	100	127,26	100	74,53	75	100	100	100

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2019-2023	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d TW II Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah s/d TW II tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau beroperasi bencana	Jumlah orang yang terlayani	12,960	495	540	-	-	4363	4363	100
	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	Jumlah orang yang terlayani	-	38,231	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Jumlah orang yang terlayani	106,380	41,649	34560	27427	77	36020	36020	100
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan kecanduan NAPZA	Jumlah orang yang terlayani	960	179	310	-	-	350	350	100
	Pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	Jumlah orang yang terlayani	238	112	50	50	148	80	80	100

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2019-2023	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d TW II Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah s/d TW II tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8 = (7/6)*100$	9	$10 = (5+7+9)$	$11 = (10/4)$
	Operasional pelayanan rumah sakit	Jumlah orang yang terlayani	1,621	1,229	540	540	-	550	550	100
-	Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi	Persentase elemen akreditasi yang terpenuhi	80	80	80	80	-	80	-	-
	Peningkatan mutu fasilitas kesehatan	Jumlah dokumen elemen akreditasi yang terpenuhi	2 Dokumen	2 Dokumen	2	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Nilai tindak lanjut akreditasi dari rekomendasi perencanaan perbaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan pakasitas SDMk	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2019-2023	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d TW II Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah s/d TW II tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
-	Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia untuk UKM dan UKM rujukan provinsi	Persentase pembayaran gaji Non ASN	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah pegawai Non ASN/Kontrak	155	143	143	143	100	155	155	100

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan semester I tahun 2022 diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi

- Pada Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi pada semester I tahun 2022 indikator pada kegiatan ini mencapai target yaitu 19 orang pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sehingga realisasi tercapai 73%.
- Pada sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik telah tercapai 100% dengan jumlah pemakaian internet pertahun sebesar 300 MBPS. Sedangkan untuk pemakaian listrik pertahun sebesar 200 KVA. Dan untuk kebutuhan air tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 relatif mengalami peningkatan sesuai dengan kebutuhan.
- Pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD indikator pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dari target yang ditentukan sebesar Rp.20.500.000.000 dan sampai dengan semester I telah mencapai sebesar Rp.8.691.142.444 atau 42%.

b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

- Pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi telah Tercapainya/terselenggaranya alat kesehatan sesuai standar, pengadaan prasarana fasilitas kesehatan yang sesuai standar, barang penunjang operasional serta terselenggaranya Obat, Vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan.
 - Pada sub kegiatan pengadaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya, RSJ Mutiara Sukma membeli obat-obatan jiwa sebanyak 13 jenis obat.
- Pada kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi telah tercapainya target kegiatan untuk pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK) serta pengelolaan pelayanan kesehatan khusus.
- Pada kegiatan Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi, kegiatan survey akreditasi RS direncanakan dan dilaksanakan pada bulan November 2022.

2.2 Analisis kinerja pelayanan RSJ Mutiara Sukma

Analisis kinerja pelayanan RSJ Mutiara Sukma didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.2.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	S/d Juni 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			-	-	78	81	76,39	76,39	79	81	
-	Administrasi keuangan perangkat daerah			-	-	100	100	92,8	100	100	100	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN			-	-	250	253	232	253	265	280	
-	Administrasi kepegawaian perangkat daerah			-	-	60	60	88,1	44	60	60	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi			158	39	12	26	12	19	282	291	
-	Administrasi Umum perangkat daerah			-	-	-	100	-	-	100	100	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			-	-	-	-	-	-	12	12	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			-	-	-	11	-	-	-	-	
	Penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			-	-	-	2	-	-	-	-	

Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nusa Tenggara Barat

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	S/d Juni 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			-	-	-	100	-	-	100	100	
	Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan			-	1	-	-	-	-	1	1	
-	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			-	-	100	100	100	100	100	100	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik			3	3	3	3	3	3	3	3	
-	Peningkatan pelayanan BLUD			-	-	56,45	77,81	78,12	33	77,81	100	
	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD			16.724.262.701	14.718.499.655,11	19.500.000.000	20.500.000.000	26.987.371.826,19	8.691.142.444	20.500.000.000,00	27.170.860.611,66	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					73,81	75	81,82	77,27	75	76,19	
				-	-	80	80	80	80	80	80	
-	Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi			-	-	89	91	89	24,14	91	93	
	Pengembangan rumah sakit			-	1	1	-	1	-	1	1	
	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit			4	-	0	-	0	-	1	1	

Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nusa Tenggara Barat

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	S/d Juni 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan			36	78	19	36	19	-	72	96	
	Pengadaan prasarana fasilitas layanan kesehatan			-	72	46	-	46	-	81	85	
	Pengadaan barang penunjang operasional rumah sakit			5	81	58	-	58	-	40	60	
	Pengadaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya			13	13	13	13	13	13	13	13	
-	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi			-	-	100	100	127,26	47,53	100	100	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau beroperasi bencana			-	-	4277	540,00	495	-	4,23	4,363	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB			-	-	24269	-	38231	-	-	-	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)			38,759	33	34900	35460	41649	27427	35,46	36,02	

Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nusa Tenggara Barat

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	S/d Juni 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan kecanduan NAPZA			-	-	300	310	179	57	310	350	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan khusus			31	65	78	50	112	74	-	80	
	Operasional pelayanan rumah sakit					531	540	1229	48	540	550	
-	Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi			-	-	80	80	80	-	80	80	
	Peningkatan mutu fasilitas kesehatan			-	-	2	2	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan			80	80	-	-	-	-	-	-	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			-	-	100	100	100	100	100	100	
-	Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia untuk UKM dan UKM rujukan provinsi			-	-	100	100	100	100	100	100	
	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan			-	-	143	143	143	143	143	155	

Hasi Evaluasi pencapaian kinerja semester I tahun 2022

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan RSJ Mutiara Sukma semester I Tahun 2022.

A. Pencapaian Kinerja Pelayanan Intramural

a) Pelayanan Rawat Jalan

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, kunjungan rawat jalan cenderung fluktuatif. Tahun 2019 kunjungan rawat jalan RSJ Mutiara Sukma sebesar 35.465 kunjungan dan tahun 2020 menurun sebesar 10,9% menjadi 31.599 kunjungan, penurunan kunjungan ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi bencana non alam pandemi Covid-19 dan adanya pembatasan pelayanan sesuai protokol Covid-19 serta adanya penetapan peraturan sistem rujukan berjenjang oleh BPJS. Pada tahun 2021 meningkat sebesar 6,8% menjadi 37.428 kunjungan. kunjungan rawat jalan sampai dengan semester I tahun 2022 sebanyak 25,732 kunjungan. Adanya peningkatan jumlah kunjungan tahun 2021 karena keberhasilan instalasi PKRS dalam mensosialisasikan jenis layanan yang ada di RSJ Mutiara sukma dan cara merujuk ke RSJ tanpa melalui sistem rujukan yang berjenjang. Selain itu kasus Covid-19 di provinsi NTB telah menurun dan sebagian besar masyarakat sudah divaksinasi.

b) Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan rawat inap terdiri dari pelayanan kelas I, kelas II dan kelas III yang terbagi dalam 7 ruang perawatan untuk pasien gangguan jiwa dan 1 ruang perawatan detoksifikasi dan rehabilitasi NAPZA. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir jumlah kunjungan rawat inap mengalami fluktuasi dimana tahun 2019 jumlah kunjungan rawat inap sebesar 1.602 kunjungan dan tahun 2020 kunjungan rawat inap menurun menjadi 1.341 kunjungan, sedangkan tahun 2021 kunjungan rawat inap meningkat menjadi 1.431. Kunjungan rawat inap sampai dengan semester I tahun 2022 sebanyak 742 kunjungan. Adanya peningkatan jumlah kunjungan tahun 2021 karena keberhasilan instalasi PKRS dalam mensosialisasikan jenis layanan yang ada di RSJ Mutiara sukma dan cara merujuk ke RSJ tanpa melalui sistem rujukan yang berjenjang

c) Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Sebagai RS Jiwa dengan Instalasi Kegawatdaruratannya yang khusus, maka kunjungan di IGD RSJ Mutiara Sukma terbanyak masih melayani kasus kegawatdaruratan psikiatri. Kunjungan ke IGD RSJ Mutiara Sukma tahun 2019

sebanyak 1,692 kunjungan dan menurun pada tahun 2020 menjadi 1.517 kunjungan, sedangkan tahun 2021 meningkat menjadi 1.668 kunjungan sedangkan kunjungan IGD sampai dengan semester I tahun 2022 sebanyak 953 kunjungan.

d) Pelayanan ODGJ dengan COVID-19 (Penyakit Infeksi)

Sejak diterapkannya RSJ Mutiara Sukma sebagai Rumah Sakit Rujukan darurat Covid-19 khusus untuk pasien ODGJ dengan Covid-19 (penyakit infeksi), maka jumlah kunjungan pada tahun 2021 sebanyak 205 kasus, dengan rincian antara lain 145 kasus dengan kasus suspek covid-19 dan 60 dengan kasus terkonfirmasi covid-19, jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 tahun 2021 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 dikarenakan pada tahun 2021 jumlah kasus Covid-19 di provinsi NTB meningkat yang berimbas pada peningkatan kasus pasien ODGJ dengan Covid-19.

Jumlah kasus pasien ODGJ dengan Covid-19 semester I tahun 2022 sebanyak 58 kasus, dengan rincian antara lain 23 kasus dengan suspek Covid-19 dan 35 kasus terkonfirmasi kasus Covid-19.

e) Pelayanan Rehabilitasi NAPZA

Berdasarkan laporan tahun 2021 jumlah kasus penyalahgunaan Napza yang direhabilitasi di RSJ Mutiara Sukma adalah 179 kasus, menurun dibandingkan dengan tahun 2020 yakni sebesar 239 kasus. Sedangkan jumlah pasien penyalahgunaan Napza semester I tahun 2022 sebanyak 57 kasus, dengan rincian rawat jalan sebesar 27 kasus dan rawat inap 30 kasus kunjungan.

f) Pelayanan Konseling dan HIV/AIDS

Pelayanan HIV/AIDS di RSJ Mutiara Sukma dilaksanakan di unit Konseling Tes HIV/AIDS. Berdasarkan laporan jumlah klien dalam 3 (tiga) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Tahun 2019 jumlah klien adalah 947 klien, dan tahun 2020 jumlah klien menurun sebesar 19% menjadi 767 klien. Sedangkan Tahun 2021 jumlah klien meningkat 68,31% menjadi 1.291 kunjungan. Peningkatan kunjungan tahun 2021 ini karena RSJ Mutiara Sukma telah mensosialisasikan jenis-jenis pelayanan yang ada di RSJ Mutiara Sukma termasuk pelayanan Konseling dan Tes HIV/AIDS. Pada semester I tahun 2022 kunjungan pelayanan HIV/AIDS di RSJ Mutiara Sukma sebanyak 693 kunjungan.

g) Pelayanan Rehabilitasi Psikososial

Rehabilitasi psikososial adalah tahapan akhir dari perawatan pasien rawat inap untuk melatih kemandirian bagi pasien. Pelayanan rehabilitasi psikososial dikoordinir oleh instalasi rehabilitasi psikososial. Tujuannya untuk mempersiapkan pasien kembali ke keluarga dan masyarakat dengan memberikan beberapa terapi secara psikologis dan membekali mereka dengan berbagai keterampilan agar siap kembali ke masyarakat dan mampu kembali produktif dan berkarya, sehingga tidak menjadi beban bagi masyarakat dan keluarganya.

h) Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pelayanan rehabilitasi medik tahun 2021 sebesar 199 kunjungan dan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan jumlah kunjungan 53 kunjungan, untuk pelayanan rehabilitasi medik semester I tahun 2022 sebesar 839 kunjungan. Peningkatan pada tahun 2021 ini disebabkan karena kasus pandemi covid-19 di provinsi NTB telah mengalami penurunan dan RSJ Mutiara Sukma telah berhasil melakukan sosialisasi tentang jenis-jenis layanan di rumah sakit. Sedangkan.

i) Pelayanan Psikometri

Pelayanan psikometri Tahun 2021 sebesar 2,429 pemeriksaan dan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 2,062 pemeriksaan. Peningkatan ini disebabkan karena adanya permintaan tes kesehatan jiwa sebagai persyaratan rekrutmen pegawai, penempatan pegawai bahkan untuk persyaratan pemilihan pejabat publik. Pelayanan psikometri pada semester I tahun 2022 sebesar 2325 pemeriksaan, tingginya jumlah kenaikan pemeriksaan pelayanan psikometri pada Semester I tahun 2022.

j) Pelayanan Psikiatri Anak “Mental Sehat Ceria” (MSC)

Pelayanan psikiatri anak adalah klinik yang menangani kasus kejiwaan pada anak dan remaja. MSC juga memiliki fasilitas untuk melayani pasien dengan permasalahan pada tumbuh kembangnya. Adapun pelayanan yang terdapat di klinik MSC antara lain konsultasi dengan spesialis konsultan jiwa anak, pelayanan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik seperti terapi wicara, terapi okupasi dan fisioterapi. Selain itu MSC juga melayani pemeriksaan fisik dan mental, tes IQ, konseling psikolog, tes kepribadian, tes bakat minat, tes perkembangan, dan tes kesiapan masuk sekolah pada anak-anak.

Jumlah kunjungan di klinik MSC tahun 2021 sebesar 2101 kunjungan, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 2,271 kunjungan.

Penurunan kunjungan ini disebabkan karena kurangnya salah satu psikiater (dokter spesialis jiwa) di poli anak dan remaja sehingga pasien disatukan dengan poli dewasa. Jumlah kunjungan di poli anak dan remaja pada semester I tahun 2022 sebesar 1,061 kunjungan.

k) Pelayanan Gigi dan Mulut

Jumlah kunjungan poliklinik gigi dan mulut pada tahun 2021 sebesar 280 kunjungan dan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 88 kunjungan. Peningkatan ini disebabkan karena kasus pandemi covid-19 di provinsi NTB telah mengalami penurunan dan RSJ Mutiara Sukma telah berhasil melakukan sosialisasi tentang jenis-jenis layanan di rumah sakit. Jumlah kunjungan pelayanan gigi dan mulut sampai dengan semester I tahun 2022 sebesar 168 kunjungan,

l) Pelayanan Radiologi

Pasca gempa bumi Tahun 2018 pelayanan radiologi tidak dapat beroperasi dan pada Tahun 2020 pelayanan radiologi mulai beroperasi dan pasien mulai meningkat. Tahun 2021 jumlah kunjungan radiologi sebesar 1447 kunjungan dan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 1.100 kunjungan. Sedangkan pada semester I tahun 2022 jumlah kunjungan pelayanan radiologi sebesar 791 kunjungan. Peningkatan jumlah kunjungan radiologi tahun 2021 disebabkan karena banyaknya permintaan pelayanan *rontgen* untuk pemeriksaan Covid-19.

B. Pencapaian Kinerja Pelayanan Ekstramural

Pelayanan *ekstramural* adalah pelayanan langsung ke masyarakat yang dikoordinir oleh Instalasi Kesehatan Jiwa masyarakat (Keswamas)

a. Kegiatan integrasi dan *mobile clinic* kesehatan jiwa

Pelayanan *ekstramural* integrasi dan *mobile clinic* pada semester I tahun 2022 dilaksanakan di setiap Kabupaten dan Puskesmas dengan pertimbangan efektifitas pelayanan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan petugas kesehatan tentang masalah kesehatan jiwa dan penanganannya, serta mampu berperan aktif mendorong pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kesehatan jiwa, termasuk di dalamnya pendampingan pelayanan pengobatan dan upaya penemuan kasus baru gangguan jiwa.

b. Kegiatan Home Visit

Kegiatan *home visit* lebih difokuskan pada penanganan pasien pasung dengan melakukan kunjungan ke rumah pasien pasung baik yang pernah dirawat namun tidak pernah lagi menjalani perawatan setelah kembali ke rumah atau kasus pasung yang baru. Selama tahun 2021 kegiatan *home visite* telah dilakukan sebanyak 5 kali kunjungan. Sedangkan pada semester I tahun 2022 kegiatan *home visite* telah dilakukan sebanyak 11 kali kunjungan, ini membuktikan kegiatan *home visite* semakin berkembang.

c. Kegiatan Penanganan Pasien Pasung

Penyisiran atau penjangkauan langsung pasien pasung mulai dilaksanakan tahun 2011 dan tercatat tahun 2020 RSJ Mutiara Sukma menjangkau 62 pasien pasung, dan total sampai dengan bulan Desember 2020 sebanyak 792 pasien pasung. Semua pasien pasung yang ditemukan mendapat penanganan dari RSJ Mutiara Sukma (100% tertangani). Pelaksanaan “NTB Bebas Pasung” yang didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Dinas Kesehatan serta masyarakat adalah faktor yang mempengaruhi pencapaian positif kegiatan tersebut.

Penyisiran atau penjangkauan langsung pasien pasung mulai dilaksanakan tahun 2011 dan tercatat tahun 2021 RSJ Mutiara Sukma menjangkau 27 pasien pasung, sehingga total sampai bulan Desember 2021 sebanyak 819 pasien pasung. Sedangkan pada semester I tahun 2022 penemuan pasien pasung sebanyak 14 orang. Semua pasien pasung yang ditemukan mendapat penanganan dari RSJ Mutiara Sukma (100% tertangani). Pelaksanaan “NTB Bebas Pasung” yang didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Dinas Kesehatan serta masyarakat adalah faktor yang mempengaruhi pencapaian positif kegiatan tersebut.

Meskipun kegiatan ini telah selesai, namun RSJ Mutiara Sukma tetap berkomitmen untuk menjangkau pasien pasung di provinsi NTB.

d. Kegiatan Dropping pasien

Kegiatan *dropping* pasien adalah upaya RSJ Mutiara Sukma untuk mengembalikan pasien yang telah selesai menjalani perawatan karena keluarganya tidak mampu menjemput kembali. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban RSJ Mutiara Sukma untuk mengembalikan pasien ke keluarganya sesuai dengan standar pelayanan RSJ Mutiara Sukma. Selama tahun 2021 pasien yang di

dropping oleh RSJ Mutiara Sukma sebanyak 52 pasien, dan sampai dengan semester I tahun 2022 ada 51 jumlah pasien yang telah di *dropping* oleh RSJ Mutiara Sukma.

e. Kegiatan penanganan gangguan jiwa korban bencana/konflik Kegiatan

Tahun 2022 sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 jadi untuk kegiatan DKJPS (Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial) pada para penyintas di daerah terdampak di setiap Kabupaten/Kota di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa hanya dilakukan melalui Online. Webinar DKJPS dimasa pandemi Covid-19 lebih difokuskan kepada tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit dan terlibat langsung dengan pasien yang positive Covid-19. RSJ Mutiara Sukma juga mengadakan kerjasama dengan RSDC (Rumah Sakit Darurat Covid) untuk memberikan pelayanan DKJPS kepada tenaga kesehatan dan pasien yang berada di RSDC.

f. *Accertive Community Therapy (ACT)*

Kegiatan ACT atau terapi komunitas adalah bentuk terapi yang berusaha memanipulasi lingkungan untuk keuntungan pasien di lingkungan sosialnya. Pendekatan ini biasanya digunakan pada kasus penyalahgunaan NAPZA atau individu dengan gangguan/ketidakmampuan fungsi normal kehidupannya atau keluarga yang tidak mampu melakukan perawatan terhadap pasien yang mengalami masalah kejiwaan di masyarakat.

Bentuk layanan yang diberikan adalah :

- 1. Layanan ACT statis** : dilakukan di poliklinik maupun ruang rawat inap RSJ Mutiara Sukma, dengan sasaran pasien yang kriterianya ditentukan oleh profesional pemberi asuhan.
- 2. Layanan ACT *mobile*** : dengan kunjungan pada pasien, keluarga dan masyarakat sekitarnya pada kasus-kasus tertentu yang membutuhkan dukungan tim KESWAMAS.

g. Kegiatan *Self Help Group (SHG)* Kesehatan Jiwa

Kegiatan SHG adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam menangani gangguan jiwa di masyarakat dengan membentuk suatu kelompok yang disebut kelompok swa-bantu. Unsur kelompok SHG adalah penderita gangguan jiwa dan keluarganya serta pemerhati gangguan jiwa yang dibina oleh tim *Community Mental Health Nursing (CMHN)* yang ada di Puskesmas setempat dan tim ACT RSJ Mutiara Sukma.

Untuk tahun 2022, tidak ada kegiatan SHG yang dilakukan karena masih adanya bencana non alam pandemi Covid-19.

h. Kegiatan Ekstramural lainnya

Kegiatan lain yang dilaksanakan Instalasi Keswamas adalah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, *workshop* dan temu konsultasi kesehatan jiwa, serta penyebaran buletin Mutiara Jiwa dan *leaflet*. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat umum, kelompok berisiko, tokoh agama/tokoh masyarakat dan institusi swasta maupun pemerintah. Tujuan kegiatan adalah untuk sosialisasi dan promosi tentang pelayanan, fasilitas dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jiwa di RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, sehingga diharapkan RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB mendapat dukungan dalam pelaksanaan pelayanan program kesehatan jiwa dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat serta sebagai bentuk keseriusan RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB dalam mendukung program pemerintah di bidang kesehatan khususnya kesehatan jiwa

Khusus untuk klien NAPZA dan HIV/AIDS yang menjalani perawatan atau pernah dirawat di RSJ Mutiara Sukma, temu konsultasi diadakan dalam bentuk *Family Support Group* (FSG) dengan melibatkan keluarganya. Kegiatan *outing* yang merupakan bagian dari terapi juga dilaksanakan khusus untuk klien NAPZA.

C. Promosi Kesehatan Rumah Sakit

Promosi Kesehatan adalah proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal. Dimana Promosi Kesehatan dilakukan dengan strategi pemberdayaan masyarakat, advokasi, dan kemitraan serta didukung dengan metode dan media yang tepat, data dan informasi yang valid/akurat, serta sumber daya yang optimal, termasuk sumber daya manusia yang profesional. Instalasi PKRS RSJ Mutiara Sukma terbentuk mulai tahun 2020. Sampai dengan semester I tahun 2022 Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) telah melakukan program kegiatan antara lain : 1) Program sarana dan prasarana PKRS. 2) Program penyuluhan. 3) Program pendidikan pasien dan keluarga. 4) Program sarana dan prasarana PKRS.

D. Pencapaian Kinerja Pelayanan Penunjang

Kegiatan pelayanan penunjang medis merupakan kegiatan yang sifatnya membantu pelayanan medis untuk menegakkan diagnosis dan rehabilitasi medik pasien serta menunjang kegiatan pelayanan lainnya. Kegiatan penunjang yang tersedia di RSJ Mutiara Sukma adalah instalasi farmasi, laboratorium, gizi, IPSRS serta Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT).

1) Pelayanan Farmasi

Pada tahun 2021 ini, Instalasi farmasi selain bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan perbekalan farmasi mencakup ketersediaan obat, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Alat Pelindung Diri (APD), *Reagen* laboratorium dan gas medik. Sejak bulan Maret 2021 instalasi farmasi juga bertanggungjawab terhadap ketersediaan vaksin di rumah sakit. Hal ini sejalan dengan program vaksinasi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai upaya pengendalian dan pencegahan penyakit Covid-19.

Adapun jumlah kunjungan di instalasi farmasi yang dihitung berdasarkan jumlah lembar resep yang dilayani pada tahun 2021 sebanyak 65.028, meningkat 81% dibanding tahun 2020 yang hanya sebesar 36.021. Sedangkan jumlah resep (R/) atau jenis obat yang dilayani sebesar 199.783, meningkat 115% dibanding tahun 2020 sebesar 92.822. Rata-rata jumlah peresepan obat perlembar resep adalah 3 item obat, pada semester I tahun 2022 telah melayani kunjungan pasien dan dihitung berdasarkan jumlah resep serta jumlah lembar resep, adapun jumlah resep sampai dengan semester I tahun 2022 sebanyak 109,961, sedangkan untuk jumlah kertas/lembar resep sebanyak 35,180 lembar.

2) Pelayanan Laboratorium

Instalasi laboratorium melayani 45 jenis pemeriksaan. Tahun 2021, jumlah pemeriksaan yang dilayani sebesar 13.164, dengan 3 jenis pemeriksaan terbanyak yang dilayani adalah *Rapid Test Antigen* sebanyak 2.502 pemeriksaan (19%), darah rutin sebanyak 1.951 pemeriksaan (15%) dan Narkoba 6 Parameter sebanyak 1.201 pemeriksaan (9%).

Adapun jumlah kunjungan di instalasi laboratorium tahun 2021 sebanyak 6.117 kunjungan, meningkat 18% dibanding tahun 2020 yaitu 5.180 kunjungan. Kunjungan terbanyak berasal dari Rawat Jalan sebesar 2.894 kunjungan atau (47%). Berdasarkan status pembayaran, kunjungan terbanyak adalah BPJS sebesar 3.026 kunjungan (50%), kemudian umum 2.510 kunjungan (41%) dan sisanya tidak berbayar 581 kunjungan (10%).

Jumlah kunjungan instalasi laboratorium sampai dengan semester I tahun 2022 sebanyak 4268 kunjungan, kunjungan terbanyak berasal dari rawat jalan sebesar 2404 kunjungan, berdasarkan status bayar, kunjungan terbanyak berasal dari BPJS yaitu sebesar 1883 kunjungan, umum 2105 kunjungan dan sisanya kunjungan yang tidak membayar sebesar 280 kunjungan.

3) **Pelayanan Gizi**

Berdasarkan laporan instalasi gizi, jumlah makanan yang disediakan/dilayani oleh instalasi gizi sebesar 69.368 porsi, dengan rincian 52.319 porsi makanan biasa, 779 porsi makanan lunak/cair dan 16.270 porsi makanan standar diet khusus rumah sakit (ETPT, RG, RK, DM, Rendah Cholesterol dan RP).

Berdasarkan laporan gizi sampai dengan semester I tahun 2022 jumlah makanan yang disediakan/dilayani oleh instalasi gizi sebesar 34,290 porsi, dengan rincian 33,552 porsi makanan biasa, 659 porsi makanan lunak, dan 79 porsi untuk makanan cair.

4) **Pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)**

Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit merupakan salah satu instalasi penunjang kegiatan yang ada di Rumah Sakit yang mampu menunjukkan kinerja profesionalnya untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan IPSRS di RSJ Mutiara Sukma meliputi pemeliharaan/perbaikan alat medis, non medis, dan bangunan, pelayanan *laundry*, serta pengelolaan kesehatan lingkungan di RSJ Mutiara Sukma.

- **Pemeliharaan/perbaikan alat medis, non medis dan bangunan**

Berdasarkan laporan dari IPSR jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan yang dikerjakan Tahun 2021 sebanyak 1.987 kegiatan yang meliputi perbaikan Listrik, Air, alat medis dan Non Medis serta bangunan. Kegiatan perbaikan sarana dan prasarana ini meningkat dibandingkan Tahun 2020 sebanyak 1.979 kegiatan, dan ruang rawat inap merupakan ruangan dengan frekuensi kegiatan pemeliharaan terbanyak yakni 595 kegiatan dan 1987 kegiatan yang tidak sama atau 30%. Sedangkan jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan yang dikerjakan sampai dengan semester I Tahun 2022 sebanyak 883 kegiatan, dan ruang rawat inap merupakan ruangan dengan frekuensi kegiatan pemeliharaan terbanyak yakni sebesar 293 kegiatan.

- **Pelayanan Laundry**

Jumlah cucian linen (*laundry*) pada Tahun 2021 sebanyak 77.654 lembar dan meningkat dibandingkan jumlah cucian Tahun 2020 yaitu 62.141 lembar. Hal ini sebanding dengan banyaknya pasien rawat inap dan pasien covid-19 di RSJMS Tahun 2021, yang berdampak pada meningkatnya jumlah cucian karena penggunaan APD yang digunakan. Tahun 2021 kegiatan pencucian ulang (*rewash*) sebanyak 110 kali yang terdiri dari celana, baju dan sprei, sedangkan pada semester I tahun 2022 Jumlah cucian linen (*laundry*) sebanyak 9,478 lembar.

- **Pengelola Kesehatan Lingkungan**

Limbah Medis yang dihasilkan Tahun 2021 sebanyak 1.880.42 Kg yang terdiri dari limbah medis tajam sebanyak 133 kg dan limbah medis non tajam sebanyak 1.747,42 kg. jumlah limbah medis ini meningkat dibandingkan Tahun 2020 yaitu sebanyak 1.332,08 Kg, hal ini disebabkan karena banyaknya pasien covid 19 dan adanya pelaksanaan vaksin bagi karyawan dan masyarakat umum di RSJMS. Selain itu IPSRS juga mengelola limbah lampu sebanyak 240 buah, oli bekas sebanyak 150 liter, dan baterai bekas sebanyak 329 buah. Sementara untuk sampah harian yang dihasilkan bekerjasama dengan BSF Lingsar. Pada semester I tahun 2022 Limbah Medis yang dihasilkan sebanyak 960,3 kg dengan rincian, limbah medis tajam sebanyak 48,73 kg, dan limbah medis non tajam sebanyak 911,57 kg.

5) Pelayanan Instalasi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Instalasi Diklat menyelenggarakan pelayanan pendidikan, pelatihan, penelitian bagi peserta didik dan pegawai RSJ Mutiara Sukma dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan maupun kompetensi khususnya dalam bidang kesehatan jiwa. Kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian bagi peserta didik menjadikan instalasi Diklat sebagai salah satu unit *revenue center* di RSJ Mutiara Sukma.

Pada tahun 2021, instalasi Diklat telah melayani 385 peserta didik, yang terdiri dari peserta didik praktik/kepaniteraan klinik sebanyak 360 orang, magang 10 orang, penelitian/pengambilan data awal sebanyak 15 orang dari berbagai institusi pendidikan kesehatan dalam dan luar daerah NTB (kedokteran, keperawatan, farmasi dan psikologi), sedangkan pada semester I tahun 2022 instalasi diklat telah melayani 242 peserta didik yang

terdiri dari peserta didik praktik/kepaniteraan sebanyak 232 orang, magang 3 orang dan penelitian/pengambilan data sebanyak 7 orang dari berbagai institusi pendidikan kesehatan dalam dan luar daerah NTB.

6) Pelayanan Kerjasama

Kerjasama dengan pihak di luar RSJ Mutiara Sukma dikoordinir oleh urusan umum. Kesepakatan atau kerjasama RSJ Mutiara Sukma dengan pihak di luar RSJ Mutiara Sukma tidak hanya dengan institusi kesehatan tetapi juga dengan instansi non kesehatan, baik dengan institusi pemerintah maupun swasta. Berdasarkan laporan dari urusan umum, tahun 2021 kesepakatan pelayanan kerjasama RSJ Mutiara Sukma sebanyak 13 kesepakatan menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 35 kesepakatan. Dari keseluruhan perjanjian kerjasama tersebut, terdapat 3 kesepakatan dengan kabupaten/kota di Provinsi NTB terkait dengan pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat miskin atau bantuan sosial yaitu kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur dan Kota Mataram.

Sedangkan untuk semester I tahun 2022 RSJ Mutiara Sukma bekerja sama dengan 32 institusi pemerintah maupun swasta,

2. Pencapaian Kinerja Keuangan RSJ Mutiara Sukma Sampai Dengan Semester I Tahun 2022

Realisasi total belanja pengeluaran RSJ Mutiara Sukma sampai dengan semester I tahun 2022 sebesar Rp.21.212.637.496,00, dari target sebesar Rp.54.695.754.231,00 atau sebesar 38,78%. Sedangkan untuk realisasi pendapatan BLUD sampai dengan semester I tahun 2022 sebesar Rp.8.691.142.444, dari target sebesar Rp.20.500.000.000, yang telah ditentukan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSJ Mutiara Sukma

1) Tingkat Kinerja Pelayanan

Tingkat kinerja pelayanan RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB dapat digambarkan melalui pencapaian indikator kinerja semester I tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.3.1

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang	253 orang	232 orang
	Pengadministrasi kepegawaian perangkat daerah	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah orang	26 orang	19 orang
	Administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah mebeleur	11 unit	-
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan yang dilaporkan	2 laporan	2 laporan
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis	3 jenis	3 jenis
	Peningkatan pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD	Jumlah pendapatan BLUD	20.500.000.000	8.691.142.444
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, alat kesehatan untuk UKP rujukan, Ukm dan Ukm rujukan tingkat daerah provinsi	Penyediaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan	Jumlah alkes	36 unit	-
		Pengadaan obat, vaksin makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah jenis	13 jenis	13 jenis

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah orang	540 orang	317 orng
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Jumlah orang	35460 orang	27.427
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan kecanduan NAPZA	Jumlah orang	310 orang	57 orang
		Pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	Jumlah orang	50 orang	90 orang
		Operasi pelayanan rumah sakit	Jumlah orang	540 orang	120 orang
	Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Jumlah dokumen	2 dokumen	2 dokumen
Program peningkatan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP provinsi	Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP provinsi	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah orang	143 orang	143 orang

2. Tingkat Kinerja Keuangan

Tingkat kinerja keuangan RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB dapat digambarkan melalui pencapaian indikator kinerja sampai dengan semester I tahun 2022 sebagai berikut:

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	Administrasi keuangan perangkat daerah	22.386.216.747	11.223.382.087	50,14
	- Gaji dan tunjangan ASN	15.090.412.599	7.580.899.797	50,24
	- Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	4.319.848.968	2.207.853.249	51,11
	- Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN	2.075.624.604	1.013.609.140	48,83
	- Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN	900.330.576	421.019.901	46,76
2	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	52.000.000	19.400.000	37,31
	- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	52.000.000	19.400.000	37,31
3	Administrasi umum perangkat daerah	232.170.800	-	-
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	57.170.800	-	-
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	175.000.000	-	-
4	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	145.000.000	86.968.260	59,98
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	145.000.000	86.968.260	59,98
5	Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	5.402.573.684	885.805.342	16,40
	- Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan	1.400.973.684	-	-
	- Pengadaan obat, vaksin makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	4.001.600.000	885.805.342	22,14
6	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	420.366.700	170.290.726	40,51
	- Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	50.429.200	-	-

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
	- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	86.575.000	12.650.000	14,61
	- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan kecanduan NAPZA	27.375.000	-	-
	- Pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	248.675.000	157.640.726	63,39
	- Operasi pelayanan rumah sakit	7.312.500	-	-
7	Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi	97.462.300	-	-
	- Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	97.462.300	-	-
8	Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP provinsi	5.460.000.000	2.564.000.000	46,96
	- Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	5.460.000.000	2.564.000.000	46,96
9	Peningkatan pelayanan BLUD	20.500.000.000	6.262.791.081	30,55
	- Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	20.500.000.000	6.262.791.081	30,55

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan rancangan awal RKPD serta berdasarkan review I Renstra RSJ Mutiara Sukma, maka dilakukan analisa terhadap kebutuhan kegiatan untuk tahun 2022 berdasarkan permasalahan, situasi dan kondisi serta perubahan-perubahan yang kemungkinan akan dihadapi rumah sakit dan tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel T-C.3.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPД Sampai Dengan Semester I Tahun 2022
Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	RANCANGAN AWAL RKPД (Berdasarkan Renstra)				Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Dana Diusulkan (Rp)	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Dana Diusulkan (Rp)	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai Sakip OPD	79	50.673.645.694,74	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai Sakip OPD	100	24.020.117.145,00	
-	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pembayaran gaji ASN	100	26.554.081.102,25	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pembayaran gaji ASN	100	24.020.117.145,00	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN	265	26.554.081.102,25	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN	253	24.020.117.145,00	
-	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terpenuhinya standar pelayanan minimal	60	96.110.696,75	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terpenuhinya standar pelayanan minimal	60	52.000.000,00	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah orang	282	96.110.696,75	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah orang	26	52.000.000,00	
-	Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase kegiatan yang dilaporkan	100	12.469.882,35	Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase kegiatan yang dilaporkan	100	232.170.800	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah mebeleur	-	-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah mebeleur	11	57.170.800,00	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan	-	-	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan	2	175.000.000,00	
	Penyediaan barang cetakan	Jumlah laporan	12	12.469.882,35	Penyediaan barang cetakan	Jumlah laporan	-	-	

No	RANCANGAN AWAL RKPD (Berdasarkan Renstra)				Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Dana Diusulkan (Rp)	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Dana Diusulkan (Rp)	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan penggandaan				dan penggandaan				
-	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	420.484.298,28	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	
	Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah unit	1	420.484.298,28	Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah unit	-	-	
-	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	163.517.382,48	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	145.000.000,00	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah jenis sumber daya	3 Jenis	163.517.382,48	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah jenis sumber daya	3 Jenis	145.000.000,00	
-	Peningkatan pelayanan BLUD	Persentase realisasi pendapatan BLUD	77,81%	23.426.982.332,63	Peningkatan pelayanan BLUD	Persentase realisasi pendapatan BLUD	77,81	20.500.000.000,00	
	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah pendapatan BLUD	23.426.982.332,63	23.426.982.332,63	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah pendapatan BLUD	20.500.000.000,00	20.500.000.000,00	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase SPM yang mencapai target	75%	10.339.417.901,64	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase SPM yang mencapai target	75	5.920.366.684,00	
		Persentase capaian elemen akreditasi sesuai standar	80%			Persentase capaian elemen akreditasi sesuai standar	80		
-	Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan	91%	8.852.516.381,95	Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan	91	5.402.537.684,00	

Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nusa Tenggara Barat

No	RANCANGAN AWAL RKPD (Berdasarkan Renstra)				Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Dana Diusulkan (Rp)	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Dana Diusulkan (Rp)	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	rujukan tingkat daerah provinsi				rujukan tingkat daerah provinsi				
	Pengembangan rumah sakit	Jumlah unit gedung	1	1.531.075.000	Pengembangan rumah sakit	Jumlah unit gedung	-	-	
	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit	Jumlah unit gedung	1	476.857.954,23	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit	Jumlah unit gedung	-	-	
	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan	Jumlah unit alkes	72	1.393.517.080,58	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan	Jumlah unit alkes	36 Unit	1.400.937.684,00	
	Pengadaan prasarana fasilitas layanan kesehatan	Jumlah unit mebeleur	81	92.751.419,54	Pengadaan prasarana fasilitas layanan kesehatan	Jumlah unit mebeleur	-	-	
	Pengadaan barang penunjang operasional rumah sakit	Jumlah unit	40	521.075.052,84	Pengadaan barang penunjang operasional rumah sakit	Jumlah unit	-	-	
	Pengadaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah jenis	13	4.837.239.874,76	Pengadaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah jenis	13 Jenis	4.001.600.000,00	
-	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	Persentase masyarakat yang terlayani	100%	1.085.972.728,56	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	Persentase masyarakat yang terlayani	75	420.366.700,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau beroperasi bencana	Jumlah orang yang terlayani	4,320	138.843.022,88	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau beroperasi bencana	Jumlah orang yang terlayani	540	50.429.200,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Jumlah orang yang terlayani	35,460	252.287.898,10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Jumlah orang yang terlayani	35.460	86.575.000,00	

Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nusa Tenggara Barat

No	RANCANGAN AWAL RKPD (Berdasarkan Renstra)				Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Dana Diusulkan (Rp)	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Dana Diusulkan (Rp)	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan kecanduan NAPZA	Jumlah orang yang terlayani	310	99.057.061,67	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan kecanduan NAPZA	Jumlah orang yang terlayani	310	27.375.000,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	Jumlah orang yang terlayani	80	577.890.464,45	Pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	Jumlah orang yang terlayani	50	248.675.000,00	
	Operasional pelayanan rumah sakit	Jumlah orang yang terlayani	540	17.894.281,46	Operasional pelayanan rumah sakit	Jumlah orang yang terlayani	540	420.366.700,00	
-	Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi	Persentase elemen akreditasi yang terpenuhi	80%	400.928.791,13	Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi	Persentase elemen akreditasi yang terpenuhi	80	97.462.300,00	
	Peningkatan mutu fasilitas kesehatan	Jumlah dokumen elemen akreditasi yang terpenuhi	2 Dokumen	400.928.791,13	Peningkatan mutu fasilitas kesehatan	Jumlah dokumen elemen akreditasi yang terpenuhi	2 Dokumen	97.462.300,00	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase kapasitas sumber daya manusia kesehatan yang mencapai target	100%	7.818.449.196,76	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase kapasitas sumber daya manusia kesehatan yang mencapai target	100	5.460.000.000,00	
-	Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia untuk UKM dan UKM rujukan provinsi	Persentase pembayaran gaji pegawai NON ASN	100%	7.818.449.196,76	Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia untuk UKM dan UKM rujukan provinsi	Persentase pembayaran gaji pegawai NON ASN	100	5.460.000.000,00	
	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah pegawai NON ASN/Kontrak	150 Orang	7.818.449.196,76	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah pegawai NON ASN/Kontrak	143	5.460.000.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan sesuai standar, RSJ Mutiara Sukma memerlukan dukungan pemerintah daerah. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan pada semester I tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 71/2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bahwa rumah sakit yang belum terakreditasi tidak dapat lagi bermitra dengan BPJS Kesehatan. Adapun salah satu kewajiban pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2017 pasal 13 bahwa pemerintah daerah wajib memberikan bantuan pembiayaan untuk proses akreditasi, dengan persyaratan wajib adalah ASPAK dan pemenuhan tenaga teknis dokter spesialis kedokteran jiwa/psikiater dan dokter spesialis penunjang seperti : dokter spesialis syaraf, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis radiologi, dokter spesialis patologi klinik dll yang wajib memiliki surat izin praktek di RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB.
2. Kondisi RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB saat ini sangat jauh berubah, selain sebagai lahan praktek bagi siswa kesehatan juga penambahan jenis pelayanan : RSJ Mutiara Sukma memiliki 7 ruang perawatan antara lain: 1) Melati, 2) Angsoka, 3) Dahlia, 4) Mawar, 5) Angrek, (Rehabilitasi NAPZA), 6) Isolasi, 7) Kenanga, 8) Wijaya Kusuma, 9) Flamboyan, dengan kapasitas Tempat Tidur tersedia 104 Tempat Tidur.
3. Pembayaran gaji pegawai Non PNS RSJ Mutiara Sukma tahun 2022 menggunakan alokasi anggaran APBD dan BLUD pada anggaran pendukung pelayanan dan penunjang pelayanan wajib, sehingga kegiatan yang seharusnya dilaksanakan sesuai standar tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, hal ini sangat berpengaruh pada kelancaran pelayanan dan mutu pelayanan RSJ Mutiara Sukma.
4. Realisasi Pendapatan RSJ Mutiara Sukma s.d Juni 2022 belum mencapai target, berikut rinciannya :

No	Target 2022	Realisasi Pendapatan (Rp)				Proyeksi Pendapatan (Rp)	Kendala
		Tahun 2021	%	s.d Juni 2022	%	S/d Desember 2022	
1	20.500.000.000,00	26.987.371.826,19	138,40%	8.691.142.444,00	42,40%	17.382.284.888,00	Keterlambatan pembayaran klaim BPJS dan klaim Covid-19

Dari keadaan diatas maka dapat digambarkan kebutuhan yang prioritas untuk dilaksanakan di tahun 2022 antara lain:

- a. Meningkatkan mutu pelayanan secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit
- b. Peningkatan program upaya kesehatan masyarakat dengan pemenuhan ketersediaan tenaga teknis di bidang kesehatan diantaranya dokter spesialis kedokteran jiwa/psikiater, dokter spesialis penunjang, dokter umum, keperawatan dan lain-lain yang memiliki SIP dan SIK di RSJ Mutiara Sukma.
- c. RSJ Mutiara Sukma menjadi RS Afiliasi Pendidikan.
- d. Pengembangan gedung pelayanan rawat jalan, rawat inap dan pelayanan penunjang sesuai standar.
- e. Pengadaan peralatan kedokteran dan alat-alat kesehatan sesuai prioritas kebutuhan yang berstandar.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2022 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas Perangkat Daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang **GEMILANG**, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, dimana RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB mendukung misi ke-3 yaitu: “**NTB SEHAT DAN CERDAS**” Melalui peningkatan kualitas daya saing sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah.

4.1 Sumber Daya RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB

Rancangan Awal Renja 2022

RSJ Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2022

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Dana Diusulkan (Rp)
1	2	3	4	5
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai Sakip OPD	79	50.673.645.694,74
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pembayaran gaji ASN	100%	26.554.081.102,25
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN	265	26.554.081.102,25
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terpenuhinya standar pelayanan minimal	60%	96.110.696,75
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah orang	282	96.110.696,75
	Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase kegiatan yang dilaporkan	100%	12.469.882,35
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah laporan	12	12.469.882,35
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	420.484.298,28
	Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah unit	1	420.484.298,28
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	163.517.382,48
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah jenis sumber daya	3 Jenis	163.517.382,48
	Peningkatan pelayanan BLUD	Persentase realisasi pendapatan BLUD	77,81%	23.426.982.332,63
	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah pendapatan BLUD	23.426.982.332,63	23.426.982.332,63
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase SPM yang mencapai target	75%	10.339.417.901,64
		Persentase capaian elemen akreditasi sesuai standar	80%	
	Penyediaan fasilitas	Persentase	91%	8.852.516.381,95

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Dana Diusulkan (Rp)
1	2	3	4	5
	pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan		
	Pengembangan rumah sakit	Jumlah unit gedung	1	1.531.075.000
	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit	Jumlah unit gedung	1	476.857.954,23
	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan	Jumlah unit alkes	72	1.393.517.080,58
	Pengadaan prasarana fasilitas layanan kesehatan	Jumlah unit mebeleur	81	92.751.419,54
	Pengadaan barang penunjang operasional rumah sakit	Jumlah unit	40	521.075.052,84
	Pengadaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah jenis	13	4.837.239.874,76
	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	Persentase masyarakat yang terlayani	100%	1.085.972.728,56
	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau beroperasi bencana	Jumlah orang yang terlayani	4,320	138.843.022,88
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Jumlah orang yang terlayani	35,460	252.287.898,10
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan kecanduan NAPZA	Jumlah orang yang terlayani	310	99.057.061,67
	Pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	Jumlah orang yang terlayani	80	577.890.464,45
	Operasional pelayanan rumah sakit	Jumlah orang yang terlayani	540	17.894.281,46
	Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi	Persentase elemen akreditasi yang terpenuhi	80%	400.928.791,13
	Peningkatan mutu fasilitas kesehatan	Jumlah dokumen elemen akreditasi yang terpenuhi	2 Dokumen	400.928.791,13

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Dana Diusulkan (Rp)
1	2	3	4	5
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase kapasitas sumber daya manusia kesehatan yang mencapai target	100%	7.818.449.196,76
	Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia untuk UKM dan UKM rujukan provinsi	Persentase pembayaran gaji pegawai NON ASN	100%	7.818.449.196,76
	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah pegawai NON ASN/Kontrak	150 Orang	7.818.449.196,76

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja perubahan perubahan dari renja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan misi serta target dan sasaran pembangunan yang di operasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan pemerintah tahun 2022. Rencana Kerja Perubahan RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB sebagai bahan dalam pelaksanaan rencana kegiatan fasilitas pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD perubahan tahun 2022 dan untuk mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan (Januari-Juni 2022)

Dengana adanya Rencana Kerja Perubahan RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2022, maka penerapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari tujuan dan sasaran RSJ Mutiara Sukma diharapkan lebih terkordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan instansi terkait.

Demikian rancangan Rencana Kerja Perubahan ini dibuat sebagai gambaran kebutuhan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan RSJ Mutiara Sukma sampai dengan semester I tahun 2022. Disadari bahwa dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya.